

**ANALISA EKSPLOITASI PERDAGANGAN MANUSIA PADA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL DI INDRAMAYU TAHUN 2017 - 2021**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
BAKRIE**

Fahirah Said

NIM : 1201004022

Dosen Pembimbing :

Asmiati Abdul Malik, S.Kom, S.Ip, MA

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
KONSENTRASI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BAKRIE**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya penulis sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fahirah Said

NIM. : 1201004022

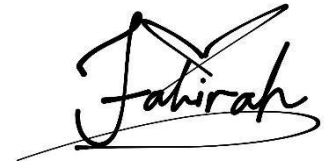
Menvatakan bahwa

1. Karya tulis ini muni hasil karya asli penulis sendiri, dan semua sumber informasi yang digunakan dalam penelitian in telah penulis cantumkan dengan jujur dan lengkap.
2. Penulis tidak melakukan plagiat tau pengambilan ide tapa memberikan kredit kepada penulis aslinya.
3. Penulis juga menyatakan bahwa karya tulis in belum pernah digunakan dengan konten yang sama, untuk proyek, laporan dan tugas di kelas lain.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan

dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi etik atau sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan dunia pendidikan.

Senin, 4 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fahirah', with a stylized flourish underneath.

Fahirah Said

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN


Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Fahirah Said
NIM : 1201004022
Program Studi : Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : **Analisa Eksploitasi Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural Di Indramayu Tahun 2017 - 2021**

Telah berhasil menyelesaikan revisi tugas akhir dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran yudisium untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik konsentrasi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie.

DEWAN PANGUJI

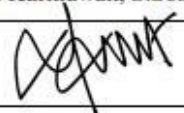
Pembimbing : Asmiati Abdul Malik, S.Kom, S.Ip, MA



Pembahas 1 : Insan Harapan Harahap, S.Sos., M.AP.



Pembahas 2 : Yudha Kurniawan, S.Sos., M.A.



Ditetapkan di Jakarta

Tanggal: 5 Maret 2024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN

Sebagai civitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fahirah Said

NIM : 1201004022

Program Studi : Ilmu Politik Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dalam rangka pengembangan pengetahuan, saya memberikan izin kepada Universitas Bakrie untuk memperoleh Non- **Hak Bebas Royalti eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah yang saya tulis berjudul:

Analisa Eksploitasi Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Non-prosedural Di Indramayu Tahun 2017 – 2021.

Beserta perangkat yang ada (apabila diperlukan). Dalam kerangka Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Bakrie diberikan hak untuk melakukan penyimpanan, konversi media/ format, pengelolaan dalam bentuk pangkalan data (dataset), pemeliharaan, serta publikasi atas tugas akhir yang saya hasilkan, dengan tetap menyertakan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan pemegang Hak Cipta, demi tujuan akademis.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal: 8 Februari 2024

Yang Menyatakan,



Fahirah Said

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISA EKSPLOITASI PERDAGANGAN MANUSIA PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL DI INDRAMAYU TAHUN 2017 - 2021.”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hubungan Internasional, Ilmu Politik di Universitas Bakrie dengan baik dan lancar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang beragam. Namun, berkat bimbingan dan dukungan moral serta spiritual dari berbagai pihak, penulis berhasil mengatasi semua itu. Tidak dapat disangkal bahwa dalam penyelesaian skripsi ini membutuhkan usaha yang keras. Namun hal itu tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan serta nasihat dari pihak-pihak yang sudah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., IPU. selaku Rektor Universitas Bakrie
2. Dr.rer.pol. Aditya Batara Gunawan, S.Sos., M.Litt selaku Kaprodi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
3. Asmiati Abdul Malik, S.I.P., S.Kom., M.A., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan, masukan dan pembelajaran dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Said Salim Baladraf, Ibu Faerus Kadir Thalib, Sheila Baladraf, Fariz Baladraf, Salim Fahry Said Baladraf selaku kedua Orang Tua dan Kakak penulis yang telah mendukung memberikan doa dan semangat kepada penulis.
5. Keluarga besar penulis yang selalu membantu dan memberikan semangat serta pembelajaran-pembelajaran berharga dalam hidup penulis
6. Kezia Victoria serta Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Peneliti berharap agar skripsi tersebut dapat memberikan manfaat sebagai referensi dan acuan dalam penulisan skripsi bagi generasi-generasi selanjutnya. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan peneliti bersedia menerima saran dan masukan agar dapat menyempurnakan skripsi yang telah disusun ini.

ABSTRAK

Kejahatan perdagangan manusia, atau *human trafficking*, merupakan kejahatan kemanusiaan terorganisasi yang melibatkan sejumlah orang dengan jaringan atau keterkaitan satu sama lain, dengan tujuan mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak. Fenomena ini menjadi lebih kompleks dengan munculnya organisasi migrasi ilegal sebagai bentuk baru kejahatan transnasional. Organisasi ini menciptakan situasi di mana pekerja migran ilegal, termasuk PMI non-prosedural, menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi, terutama dalam bentuk kerja paksa. Kabupaten Indramayu, di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dikenal sebagai daerah dengan minat masyarakat tertinggi untuk bekerja di luar negeri, membuatnya berpotensi mengalami perkembangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural.

Disnaker Kabupaten Indramayu bertindak sebagai lembaga yang berusaha mencegah dan melindungi PMI non-prosedural dari kejahatan *human trafficking* di Kabupaten tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran Disnaker Kabupaten Indramayu dalam membentuk isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural sebagai ancaman yang harus segera ditangani. Dalam penelitian ini, teori konstruktivisme dan teori sekuritisasi yang diperkenalkan oleh kelompok Copenhagen School digunakan sebagai kerangka kerja. Penerapan teori sekuritisasi dimulai dengan *speech act* yang dikeluarkan oleh *securitizing actor*, dalam hal ini Disnaker Kabupaten Indramayu, untuk mengangkat isu perdagangan manusia sebagai ancaman eksistensial terhadap *referent object*, yaitu PMI non-prosedural. Proses berlanjut ke tahap *acceptance by the audience*, di mana masyarakat dan pihak berkepentingan setuju bahwa ancaman tersebut memerlukan tindakan segera. Sekuritisasi diakhiri dengan *extraordinary measures*, di mana Disnaker Kabupaten Indramayu mengimplementasikan langkah-langkah darurat untuk menangani ancaman perdagangan manusia terhadap PMI non-prosedural.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan implementasi perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis praktik pencegahan, perlindungan, dan upaya penanganan terhadap isu perdagangan manusia terkait PMI non-prosedural.

ABSTRACT

The crime of human trafficking is an organized crime against humanity that involves a number of people with networks or links to each other, with the aim of exploiting victims for unilateral gain. This phenomenon has become more complex with the emergence of illegal migration organizations as a new form of transnational crime. These organizations create situations where illegal migrant workers, including non-procedural migrant workers, become victims of human trafficking for the purpose of exploitation, especially in the form of forced labor. Indramayu Regency, in West Java Province, Indonesia, is known as an area with the highest public interest in working abroad, making it potentially subject to the development of non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI).

The Indramayu District Manpower Office acts as an institution that seeks to prevent and protect non-procedural migrant workers from the crime of human trafficking in the district. This research aims to discuss the role of the Indramayu District Manpower Office in shaping the issue of human trafficking in non-procedural migrant workers as a threat that must be addressed immediately. In this study, constructivism theory and securitization theory introduced by the Copenhagen School group are used as a framework. The application of securitization theory begins with a speech act issued by the securitizing actor, in this case the Indramayu District Manpower Office, to raise the issue of human trafficking as an existential threat to the referent object, namely non-procedural migrant workers. The process continues to the acceptance by the audience stage, where the community and interested parties agree that the threat requires immediate action. Securitization ends with extraordinary measures, where the Indramayu District Manpower Office implements emergency measures to address the threat of human trafficking against non-procedural migrant workers.

This research also aims to explore the Indonesian government's efforts in protecting Indonesian workers abroad and the implementation of legal protection under Law No. 18/2017. Thus, this research focuses on analyzing the practices of prevention, protection, and response to human trafficking issues related to non-procedural migrant workers.

DAFTAR ISI

Contents

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.0 Latar Belakang Penelitian.....	1
a. Kondisi Geografis Profil.....	6
b. Kondisi Demografis Profil Kabupaten Indramayu.....	7
c. Data mengenai jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indramayu.....	11
d. Data Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Indramayu.....	12
e. Potensi Daerah Kabupaten Indramayu mencakup berbagai aspek geografis dan hayati yang menonjol.....	12
1.1 Kebaruan.....	24
1.1.1 Penelitian Sebelumnya.....	24
1.1.2 Penyempurnaan Penelitian Akademik.....	31
1.2 Isu dan Topik Penelitian.....	32
1.3 Tujuan Studi dan Pertanyaan Penelitian.....	33
1.4 Desain Riset Metode.....	34
1.5 Struktur Penelitian.....	35
BAB II.....	37
2.0 Pendahuluan.....	37
2.1 Teori Konstruktivisme (<i>Constructivism</i>).....	37
2.2 Teori Sekuritisasi.....	40
2.2.1 Operasionalisasi Teori & Konsep.....	45
2.4 Kesimpulan Teori.....	50
2.5 Kerangka Konsep.....	50
2.5.1 Keamanan.....	51
2.5.2 Keamanan Non – Tradisional.....	52
2.5.3 Kejahatan Transnasional.....	53
2.5.4 Perdagangan Manusia.....	54
BAB III.....	54
RISET DESAIN DAN METODOLOGI PENELITIAN.....	54
3.0 Pendahuluan.....	55
3.1 Metodologi Penelitian: Kualitatif.....	55
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	56
3.3 Riset Desain.....	57

3.3.1 Studi Kasus.....	57
3.4 Pengumpulan Data.....	58
3.5 Analisis Data.....	59
3.5.1 Teknik Analisa Data	61
BAB IV.....	62
HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	62
4.0 Pendahuluan	62
4.1. Kejahatan <i>Human Trafficking</i> pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilakukan tanpa Mengikuti Prosedur Resmi.....	64
4.2 Kejahatan Perdagangan Manusia yang Menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural di Kabupaten Indramayu.....	71
4.2.1 Mensekuritisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu (<i>Securitizing Move</i>).....	80
4.2.1 <i>Acceptance by the Audience</i>	87
4.2.2. <i>Civil Society</i>	88
4.2.3. <i>Epistemic Community</i>	92
4.2.4. <i>Extraordinary Measures</i>	95
4.2.5. <i>Emergency Measures</i>	96
4.3 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Implementasi Upaya Penanggulangan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.....	99
4.4. Perlindungan Hukum dan Peran Perjanjian Kerja dalam Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	106
4.5. Faktor Penyebab <i>Trafficking</i>	111
4.7. Program Pencegahan di Indramayu	117
4.8. Program Penanganan di Indramayu.....	119
BAB V.....	121
PENUTUP.....	121
5.1 Kesimpulan.....	121
5.2 Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125

DAFTAR GRAFIK, TABEL

DAN GAMBAR

Grafik 1.1 Statistik Penempatan Daerah Asal Buruh Migran Tertinggi.....	5
Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia.....	9
Grafik 1.3 Penduduk Menurut Latar Belakang Pendidikan.....	10
Grafik 1.4 Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Indramayu.....	11
Grafik 1.5 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Kemiskinan.....	12
Grafik 1.1 Statistik Penempatan Daerah Asal Buruh Migran Tertinggi.....	4
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Indramayu.....	8
Tabel 1.2 Laporan BP2MI - Daerah Pengirim PMI Terbanyak Berdasarkan Negara.....	13
Tabel 2.1 Jenis - Jenis Speech Act menurut Voulri.....	42
Tabel 2.2 Operasionalisasi Teori	47
Tabel. 4.1 Jumlah laporan keluhan dari Pekerja Migran Indonesia.....	65
Tabel 4.2 Statistik laporan pengaduan PMI non-prosedural.....	71
Tabel 4. 3 Perbandingan Jumlah PMI Prosedural dan Ilegal setelah LTSA.....	72
Tabel 4.4 Pernyataan Petinggi Disnaker Kabupaten Indramayu.....	80
Tabel 4.5 Laporan Rekapitulasi Tabel IKM di Lingkungan BP2MI Triwulan IV 2020.....	89
Tabel 4.6 Laporan Rekapitulasi Tabel IKM di Lingkungan BP2MI Triwulan IV 2021.....	89
Tabel 4.7 Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah.....	100
Tabel 4.8 Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi.....	101
Tabel 4.9 Jenis Perjanjian dalam Penempatan PMI.....	104
Tabel 4.10 Konvensi Internasional.....	106

Tabel 4.11 Masalah Kesejahteraan Sosial Di Indramayu.....	110
Tabel 4.12 Peta Aktor Fungsi (<i>Functional Actors</i>).....	114
Tabel 4.13 Layanan terhadap kasus perlindungan perempuan.....	118
Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Indramayu.....	6
Gambar 1.2 TPPO dan Penyelundupan Migran.....	19
Gambar 2.1 Alur Pemikiran.....	48
Gambar 4.1 Gugus Tugas PPTPPO Pusat.....	69

DAFTAR ISTILAH

BLK	: Badan Layanan Kerja
BJB	: Bank Jawa Barat
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CPMI	: Calon Pekerja Migran Indonesia
Disnaker	: Dinas Tenaga Kerja
ILO	: International Labour Organization
Kruwcil	: Kredit Usaha Warung Kecil
P2TKLN	: Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri
BNP2TKI Indonesia	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
P3MI	: Penempatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Pe-Ri	: Perempuan Berdikari
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
SBMI	: Serikat Buruh Migran Indo
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
UU	: Undang- Undang
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
WNI	: Warga Negara Indonesia
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang